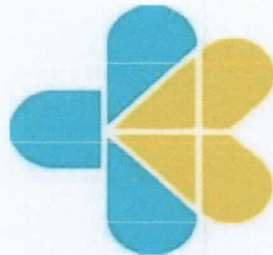


CATATAN HASIL PENELAAHAN



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

**CATATAN HASIL PENELAAHAN
ATAS RKA-K/L PAGU ANGGARAN/PAGU ALOKASI ANGGARAN
SATUAN KERJA BKK KELAS I BANDUNG
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**SATUAN KEPATUHAN INTERN (SKI)
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
2024**

SATKER BKK KELAS I BANDUNG KEMENTERIAN KESEHATAN RI	Disusun oleh/Tanggal	Nurul Afifa S.Si.T.,M.Keb.,MH.Kes / tgl 30 September 2024 Sira Elko, SKM / tgl 30 September 2024 Rahmawati Jati Murwani / tgl 30 September 2024
	Diteliti dan disetujui oleh/Tanggal	Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM. / Tgl 30 September 2024

Uraian Catatan Hasil Penelaahan

Pelaksanaan penelaahan RKA-K/L berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Nomor: PS.03.05/C.X.5/2676/2024 tanggal 30 September 2024 perihal melaksanakan kegiatan desk penelaahan RKA-KL pagu anggaran/pagu alokasi anggaran Satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung tanggal 30 September 2024.

Penelaahan ini tidak memindahkan tanggungjawab pelaksanaan anggaran Satuan Kerja kepada Tim SKI. Tanggung jawab pelaksanaan anggaran termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bidang Perencanaan dan Evaluasi/Tim Penyusun RKA-K/L.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Penelaahan sebagai berikut:

A. DATA UMUM

Pagu/Alokasi Anggaran sesuai dengan usulan RKA-K/L adalah sebagai berikut:

No.	Sumber Dana	Jenis Belanja (Rp)			Output Cadangan	Jumlah Pagu
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	(Rp)	(Rp)
1	RM	12.648.668.000	13.194.494.000	-		25.843.162.000
2	PNBP		1.471.043.000			1.471.043.000
	Jumlah	12.648.668.000	14.665.537.000	-	-	27.314.205.000

B. HASIL PENELAAHAN

Rekapitulasi hasil penelaahan adalah sebagai berikut:

No	KRO	Program/Kegiatan	Jumlah Alokasi	Jumlah Dana Hasil	Jumlah Dana Yang	Keterangan
			(Rp)		Diberi Catatan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7
1	4249.PEA	Koordinasi	1.017.288.000	853.128.000	164.160.000	14 Kegiatan
2	4249.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	135.215.000	135.215.000	-	195 Orang
3	4249.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	501.311.000	317.540.000	183.771.000	1.700 Orang, Akta, Keping, Bidang
4	4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2.817.512.000	2.817.512.000	-	141 Layanan
5	4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1.471.043.000	-	1.471.043.000	14 Paket
6	4249.TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	218.249.000	-	218.249.000	43 Orang
7	4815.AEA	Koordinasi	92.292.000	92.292.000	-	1 Kegiatan
8	4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20.765.281.000	20.684.281.000	81.000.000	32 Layanan
9	4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	33.020.000	33.020.000	-	9 Orang
10	4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	262.994.000	262.994.000	-	9 Dokumen
JUMLAH			27.314.205.000	25.195.982.000	2.118.223.000	

Adapun yang menjadi catatan pada pelaksanaan penelaahan tersebut adalah sebagai berikut :	
1. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran	-
2. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran	<p>Terdapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 4249.PEA Koordinasi, digunakan untuk lintas program dan lintas sektor. Kegiatan konsultasi, monitoring dan evaluasi, serta bimbingan teknis ke pusat, ke induk dan wilker menggunakan 4249. QAH. (sesuai Jukren hal.303) b. 4249.PEA.001.051.G.Koordinasi Persiapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji sebesar 164.160.000,- di ganti redaksinya c. 4249. PEA. C, F, G, I, K, M. kegiatan koordinasi berbentuk rapat koordinasi dan rapat evaluasi. Bukan hanya perjalanan dinas, kecuali jika menghadiri undangan dari LS/LP. (sesuai Jukren hal.303) d. 4249 PEF perlu memaksimalkan kegiatan sosialisasi secara daring. (sesuai Jukren hal.304) e. 4249.QAA.012. F sebesar Rp 183.771.000,- dapat menggunakan SBK QAH.U19. f. 4249.RAB.001 Sarana bidang kesehatan sebesar 1.471.043.000,- baiknya di gabung menjadi satu dengan harga distandarkan, begitu juga dengan ATK. g. Belum ada penganggaran Debarkasi haji <p>Kesimpulan : Terdapat alokasi anggaran sebesar Rp2.118.223.000,- tidak sesuai kaidah-kaidah penganggaran</p>
3. Kelengkapan dokumen pendukung	<ul style="list-style-type: none"> a. 4249.TBC.001 Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp.218.249.000,- Data dukung pelatihan belum semua ada b. 4815.EBA.962.C Biaya Sewa rumah dinas sebesar Rp 81.000.000,00 belum sesuai dengan data dukung yang yang tertera yaitu sebesar Rp.99.000.000,- <p>Kesimpulan: Terdapat penganggaran yang belum dilengkapi denngan data dukung yang memadai sebesar Rp.299.249.000,-.</p>
4. Konsistensi kesesuaian dengan RKP dan Renja K/L	<p>-</p> <p>Kesimpulan :</p> <p>-</p>
7. Kepatuhan biaya pemeliharaan kendaraan/sarana kantor	<p>-</p> <p>Kesimpulan :</p> <p>-</p>
8. Kepatuhan biaya pemeliharaan gedung/kantor yang ditempati	<p>-</p> <p>Kesimpulan :</p> <p>-</p>

Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui

1. Melakukan koreksi permasalahan atas kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran yaitu:
 - a. 4249.PEA Koordinasi, digunakan untuk lintas program dan lintas sektor. Kegiatan konsultasi, monitoring dan evaluasi, serta bimbingan teknis ke pusat, ke induk dan wilker menggunakan 4249. QAH. (sesuai Jukren hal.303)
 - b. 4249.PEA.001.051.G.Koordinasi Persiapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji sebesar 164.160.000,- di ganti redaksinya
 - c. 4249. PEA. C, F, G, I, K, M. kegiatan koordinasi berbentuk rapat koordinasi dan rapat evaluasi. Bukan hanya perjalanan dinas, kecuali jika menghadiri undangan dari LS/LP. (sesuai Jukren hal.303)
 - d. 4249 PEF perlu memaksimalkan kegiatan sosialisasi secara daring. (sesuai Jukren hal.304)
 - e. 4249.QAA.012. F sebesar Rp 183.771.000,- dapat menggunakan SBK QAH.U19.
 - f. 4249.RAB.001 Sarana bidang kesehatan sebesar 1.471.043.000,- baiknya di gabung menjadi satu dengan harga distandarkan, begitu juga dengan ATK.
 - g. Belum ada penganggaran Debarkasi haji
 - h. 4815.AEA. sesuaikan dengan jukren
 - i. 4815.EBA.957 Layanan Hukum sebesar Rp4.720.000 di ubah menjadi layanan reformasi birokrasi sesuai jukren
2. Kesesuaian anggaran pengadaan dengan ketentuan dan data dukung
 - a. 4249.TBC.001 Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp.218.249.000,- Data dukung pelatihan belum semua ada
 - b. 4815.EBA.962.C Biaya Sewa rumah dinas sebesar Rp 81.000.000,00 belum sesuai dengan data dukung yang tertera yaitu sebesar Rp.99.000.000,-

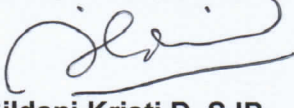
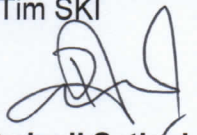
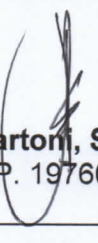
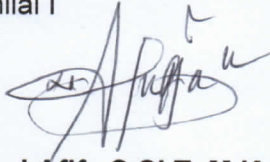

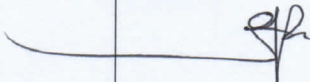
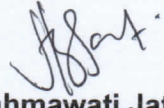
Catatan Penting Lainnya

-

Rekomendasi

Kepala BKK Kelas I Bandung agar segera :

1. Melengkapi dokumen data dukung berupa penawaran harga untuk kegiatan layanan manajemen SDM Internal dan biaya sewa rumah dinas.
2. Melakukan koreksi permasalahan atas kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran yaitu:
 - a. 4249.PEA Koordinasi, digunakan untuk lintas program dan lintas sektor. Kegiatan konsultasi, monitoring dan evaluasi, serta bimbingan teknis ke pusat, ke induk dan wilker menggunakan 4249. QAH. (sesuai Jukren hal.303)
 - b. 4249.PEA.001.051.G.Koordinasi Persiapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji sebesar 164.160.000,- di ganti redaksinya
 - c. 4249. PEA. C, F, G, I, K, M. kegiatan koordinasi berbentuk rapat koordinasi dan rapat evaluasi. Bukan hanya perjalanan dinas, kecuali jika menghadiri undangan dari LS/LP. (sesuai Jukren hal.303)
 - d. 4249 PEF perlu memaksimalkan kegiatan sosialisasi secara daring. (sesuai Jukren hal.304)
 - e. 4249.QAA.012. F sebesar Rp 183.771.000,- dapat menggunakan SBK QAH.U19.
 - f. 4249.RAB.001 Sarana bidang kesehatan sebesar 1.471.043.000,- baiknya di gabung menjadi satu dengan harga distandarkan, begitu juga dengan ATK.
 - g. Belum ada penganggaran Debarkasi haji
 - h. 4815.AEA. sesuaikan dengan jukren

<p>i. 4815.EBA.957 Layanan Hukum sebesar Rp4.720.000 di ubah menjadi layanan reformasi birokrasi sesuai jukren</p> <p>3. Kesesuaian anggaran pengadaan dengan ketentuan dan data dukung</p> <p>a. 4249.TBC.001 Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp.218.249.000,- Data dukung pelatihan belum semua ada</p> <p>b. 4815.EBA.962.C Biaya Sewa rumah dinas sebesar Rp 81.000.000,00 belum sesuai dengan data dukung yang yang tertera yaitu sebesar Rp.99.000.000,-</p>	
<p>Bandung, 30 September 2024 Ketua Tim Penyusun RKA-K/L</p>  <p>I Sildani Kristi D, S.IP NIP. 198308122015031002</p>	<p>Bandung, 30 September 2024 Ketua Tim SKI</p>  <p>Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM NIP. 197107301993032001</p>
<p>Kasubbag Adm. Umum,</p>  <p>Wartoni, SKM, MPH NIP. 197606191999031001</p>	<p>Penilai I</p>  <p>Nurul Afifa S.Si.T.,M.Keb.,MH.Kes. NIP. 197712202008012012</p>
<p>Bandung, 30 September 2024</p> <p>Mengetahui, Kepala KKP Kelas II Bandung</p>  <p>Dr. Sedya Dwisangka, M. Epid. NIP. 196901042002121003</p>	<p>Penilai II</p>  <p>Sira Elko, SKM NIP. 198304062008121003</p> <p>Penilai III</p>  <p>Rahmawati Jati Murwani NIP. 198007102003122002</p>

SURAT TUGAS
NOMOR: PS.03.05/C.X.5/2676/2024

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan reviu RKA-K/L Balai Karkes Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2025 yang akan dilaksanakan oleh Tim Satuan Kepatuhan Intern (SKI), dengan ini kami menugaskan kepada pegawai :

(nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan terlampir)

- Untuk : 1. Melaksanakan Reviu SKI terhadap RKA-K/L TA 2025 ;
2. Pada Tanggal 30 September 2024;
3. Bertempat di Balai Karkes Kelas I Bandung;
Jl. Cikapayang No 5 Kota Bandung
4. Tetap melakukan rekam absen datang dan/ atau pulang.

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

30 September 2024
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Bandung,



dr. Sedya Dwisangka, M.Epid

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

Lampiran Surat Tugas
Nomor : PS.03.05/C.X.5/2676/2024
Tanggal : 30 September 2024

DAFTAR PEGAWAI/PEJABAT YANG DITUGASKAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1.	Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM	197107301993032001	Pembina Tk.I / IV b	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)
2.	Nurul Afifa, S.Si.T., M.Keb., MH.Kes.	197712202008012012	Pembina / IV a	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)
3.	Sira Elko, S.K.M	198304062008121003	Penata Tk.I / IIId	Sanitarian Ahli Muda (JFT)
4.	Rahmawati Jati Murwani	198007102003122002	Penata / III c	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (JFT)

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Bandung,



dr. Sedyia Dwisangka, M.Epid

Nomor : PS.03.05/C.X.5/2671/2024
Lampiran : -
Hal : Undangan Reviu SKI terhadap RKA-K/L TA 2025
Balai Karkes Kelas I Bandung

30 September 2024

Yth.

1. Kasubbag Administrasi Umum
2. Ketua Tim SKI
3. Anggota Tim SKI RKA-K/L
4. Tim Perencana BKK Kelas I Bandung

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan reviu terhadap penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kepatuhan Intern (SKI) Balai Karkes Kelas I Bandung, bersama ini kami mengharapkan kehadirannya untuk dapat hadir pada:

Hari / tanggal : Senin, 30 September 2024
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Badami
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya kami sampaikan terimakasih.

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Bandung,



dr. Sedya Dwisangka, M.Epid

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

DAFTAR HADIR
REVIU SKI TERHADAP PAGU ANGGARAN RKAKL TAHUN 2025
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	dr Sedya	Kepala	BKK Bandung	1.
2	Wafoni	Pa. Adum	BKK Bdg	2.
3	Fitri Mayawati	Katimker-5 / Epidices Ahli Madya	BKK Bdg	3.
4	Yani Dwiyuti	Ketua SKI / Epidices Ahli Madya	BKK Bandung	4.
5	Liana Rica Marvia	Epidices Ahli Madya	BKK Bandung	5.
6	Rafli Adi Sucipto	Katimker I	BKK Bandung	6.
7	Sira Elko	Anggota SKI	BKK Bandung	7.
8	Triadi A.	Epidices / ko timker	BKK Bandung	8.
9	Widyanti Outaviani	Perencana	BKK Bandung	9.
10	M. D. M. D. M.	- II -	BKK Bdg.	10.
11	I. Sildari	Perencana	BKK Bdg	10.
12	Rahmawati JM	Anggota SKI	BKK Bdg	12.
13	Keke Riskawati	epidemiolog	BKK Bdg	11.
14	Arsy N.	"	BKK Bdg	14.
15				15.
16				16.
17				17.
18				18.
19				19.
20				20.



Mengetahui,
Kepala BKK Kelas I Bandung

dr. Sedya Dwisangka, M.Epid
NIP. 19690142002121003

**LAPORAN HASIL PENELAAHAN
PAGU ANGGARAN / PAGU ALOKASI
PADA SATUAN KERJA BKK KELAS I BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025
30 SEPTEMBER 2024**

A. Ringkasan Eksekutif

Dalam siklus perencanaan pembangunan nasional, tahun 2025 merupakan tahun awal dalam periode perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 dan perencanaan strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029. Memasuki tahun awal tersebut kita dihadapkan pada situasi peralihan pemerintahan sesuai hasil Pemilihan Umum yang telah kita lalui bersama. Peralihan pemerintahan membawa konsekuensi penyesuaian program-program pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden terpilih. Sebagai pelaksana program-program pemerintah, Kementerian Kesehatan termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit wajib menyesuaikan program-program yang selama ini telah disusun dan dilaksanakan untuk disesuaikan dengan visi dan misi Presiden terpilih yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L). Siklus penyusunan RKA-K/L dimulai dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden, yang selanjutnya akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan RKP. Berdasarkan penetapan ini, Kementerian/Lembaga mengevaluasi baseline (Angka Dasar) dan mengajukan usulan Inisiatif Baru. Menteri Keuangan selanjutnya menetapkan Pagu Anggaran K/L untuk penyusunan RKA-K/L. Menteri/pimpinan lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran/Pagu Indikatif Anggaran K/L yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan Renja K/L.

Sesuai instruksi pimpinan Satker BKK Kelas I Bandung untuk melakukan reviu Pagu Anggaran/Pagu alokasi Anggaran Satker BKK Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2025. Adapun penelaahan dilaksanakan pada saat penyusunan RKA-K/L Kementerian/Lembaga setelah ditetapkan Pagu Anggaran K/L.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2025
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantina Kesehatan
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
11. Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2023 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
14. Keputusan direktur jenderal perbendaharaan nomor kep-291/pb/2022 tentang pemutakhiran kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar;
15. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tahun 2025
16. Surat Tugas Kepala Nomor PS.03.04/C.X.5/2676/2024 tanggal 30 September 2024 perihal melaksanakan Review SKI terhadap RLA-K/L TA 2025 pada tanggal 30 September 2024.

C. Tujuan Penelaahan Usulan RKA-K/L

Tujuan dari dilaksanakannya review RKA-K/L pagu indikatif adalah untuk memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa informasi dalam usulan RKA-K/L sesuai dengan Pagu Anggaran/Pagu Alokasi Anggaran yang ditetapkan, standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya dan memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta dilengkapi dokumen pendukung.

D. Ruang Lingkup Review Usulan RKA-K/L

Ruang lingkup review Usulan RKA-K/L adalah review atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L satuan kerja dan dokumen pendukungnya yang mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit. Penelaahan Usulan RKA-K/L ini dilakukan terhadap Pagu Anggaran/Pagu Indikatif anggaran dalam RKA-K/L Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan review ini tidak memindahkan tanggung jawab pelaksanaan anggaran satuan kerja kepada Tim SKI. Tanggung jawab pelaksanaan anggaran termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bidang Perencanaan dan Evaluasi selaku penyusun RKA-K/L.

E. Metodologi Penelaahan Usulan RKA-K/L

1. Penelaahan dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana keuangan data serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA-K/L satuan kerja.

2. Pelaksanaan reuiu RKA-K/L berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Nomor: PS.03.04/C.X.5/2676/2024 tanggal 30 September 2024 perihal melaksanakan desk/penelaahan usulan RKA-K/L pagu anggaran/pagu alokasi anggaran satuan kerja BKK Kelas I Bandung, dengan susunan tim sebagai berikut:

- a. Koordinator : dr. Sedya Dwisangka, M.Epid.
- b. Ketua Tim : Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM
- c. Anggota Tim : Nurul Afifa S.Si.T.,M.Keb.,MH.Kes.
Sira Elko, SKM
Rahmawati Jati Murwani

F. Gambaran Umum Penelaahan Usulan RKA-K/L

Informasi umum satuan kerja adalah sebagai berikut:

- 1. Nama Satker : BKK Kelas I Bandung
- 2. Alamat : Jl. Cikapayang No. 5 Kota Bandung
- 3. Nama Kepala Satker : dr. Sedya Dwisangka, M.Epid.
- 4. Nama Penanggungjawab : dr. Sedya Dwisangka, M.Epid.
- Anggaran
- 5. Nilai Anggaran yang direviu : Rp 27.314.205.000,00.,

Pagu Anggaran/Pagu Indikatif Anggaran atas usulan RKA-K/L satuan kerja BKK Kelas I Bandung sebesar Rp 27.314.205.000,00.,dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sumber Dana	Jenis Belanja (Rp)			Output Cadangan	Jumlah Pagu
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	(Rp)	(Rp)
1	RM	12.648.668.000	13.194.494.000	-		25.843.162.000
2	PNBP		1.471.043.000			1.471.043.000
	Jumlah	12.648.668.000	14.665.537.000	-	-	27.314.205.000

G. Uraian Hasil Penelaahan

No	KRO	Program/Kegiatan	Jumlah Alokasi	Jumlah Dana Hasil	Jumlah Dana Yang	Keterangan
			(Rp)		Diberi Catatan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1	4249.PEA	Koordinasi	1.017.288.000	853.128.000	164.160.000	14 Kegiatan
2	4249.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	135.215.000	135.215.000	-	195 Orang
3	4249.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	501.311.000	317.540.000	183.771.000	1.700 Orang, Akta, Keping, Bidang
4	4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2.817.512.000	2.817.512.000	-	141 Layanan
5	4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1.471.043.000	-	1.471.043.000	14 Paket
6	4249.TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	218.249.000	-	218.249.000	43 Orang
7	4815.AEA	Koordinasi	92.292.000	92.292.000	-	1 Kegiatan
8	4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20.765.281.000	20.684.281.000	81.000.000	32 Layanan
9	4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	33.020.000	33.020.000	-	9 Orang
10	4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	262.994.000	262.994.000	-	9 Dokumen
JUMLAH			27.314.205.000	25.195.982.000	2.118.223.000	

Adapun yang menjadi catatan pada pelaksanaan penelaahan tersebut adalah sebagai berikut :	
5. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran	-
6. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran	<p>Terdapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 4249.PEA Koordinasi, digunakan untuk lintas program dan lintas sektor. Kegiatan konsultasi, monitoring dan evaluasi, serta bimbingan teknis ke pusat, ke induk dan wilker menggunakan 4249. QAH. (sesuai Jukren hal.303) b. 4249.PEA.001.051.G.Koordinasi Persiapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji sebesar 164.160.000,- di ganti redaksinya c. 4249. PEA. C, F, G, I, K, M. kegiatan koordinasi berbentuk rapat koordinasi dan rapat evaluasi. Bukan hanya perjalanan dinas, kecuali jika menghadiri undangan dari LS/LP. (sesuai Jukren hal.303) d. 4249 PEF perlu memaksimalkan kegiatan sosialisasi secara daring. (sesuai Jukren hal.304) e. 4249.QAA.012. F sebesar Rp 183.771.000,- dapat menggunakan SBK QAH.U19. f. 4249.RAB.001 Sarana bidang kesehatan sebesar 1.471.043.000,- baiknya di gabung menjadi satu dengan harga distandarkan, begitu juga dengan ATK. g. Belum ada penganggaran Debarkasi haji h. 4815.AEA. sesuaikan dengan jukren i. 4815.EBA.957 Layanan Hukum sebesar Rp4.720.000 di ubah menjadi layanan reformasi birokrasi sesuai jukren <p>Kesimpulan : Terdapat alokasi anggaran sebesar Rp2.118.223.000,- tidak sesuai kaidah-kaidah penganggaran</p>
7. Kelengkapan dokumen pendukung	<ul style="list-style-type: none"> c. 4249.TBC.001 Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp.218.249.000,- Data dukung pelatihan belum semua ada d. 4815.EBA.962.C Biaya Sewa rumah dinas sebesar Rp 81.000.000,00 belum sesuai dengan data dukung yang tertera yaitu sebesar Rp.99.000.000,- <p>Kesimpulan: Terdapat penganggaran yang belum dilengkapi dengan data dukung yang memadai sebesar Rp.299.249.000,-.</p>
8. Konsistensi kesesuaian dengan RKP dan Renja K/L	-
	<p>Kesimpulan :</p> <p>-</p>
7. Kepatuhan biaya pemeliharaan kendaraan/sarana kantor	-
	<p>Kesimpulan :</p> <p>-</p>
8. Kepatuhan biaya pemeliharaan gedung/kantor yang ditempati	-
	<p>Kesimpulan :</p> <p>-</p>

Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui

3. Melakukan koreksi permasalahan atas kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran yaitu:
 - a. 4249.PEA Koordinasi, digunakan untuk lintas program dan lintas sektor. Kegiatan konsultasi, monitoring dan evaluasi, serta bimbingan teknis ke pusat, ke induk dan wilker menggunakan 4249. QAH. (sesuai Jukren hal.303)
 - b. 4249.PEA.001.051.G.Koordinasi Persiapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji sebesar 164.160.000,- di ganti redaksinya
 - c. 4249. PEA. C, F, G, I, K, M. kegiatan koordinasi berbentuk rapat koordinasi dan rapat evaluasi. Bukan hanya perjalanan dinas, kecuali jika menghadiri undangan dari LS/LP. (sesuai Jukren hal.303)
 - d. 4249 PEF perlu memaksimalkan kegiatan sosialisasi secara daring. (sesuai Jukren hal.304)
 - e. 4249.QAA.012. F sebesar Rp 183.771.000,- dapat menggunakan SBK QAH.U19.
 - f. 4249.RAB.001 Sarana bidang kesehatan sebesar 1.471.043.000,- baiknya di gabung menjadi satu dengan harga distandarkan, begitu juga dengan ATK.
 - g. Belum ada penganggaran Debarkasi haji
 - h. 4815.AEA. sesuaikan dengan jukren
 - i. 4815.EBA.957 Layanan Hukum sebesar Rp4.720.000 di ubah menjadi layanan reformasi birokrasi sesuai jukren
4. Kesesuaian anggaran pengadaan dengan ketentuan dan data dukung
 - a. 4249.TBC.001 Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp.218.249.000,- Data dukung pelatihan belum semua ada
 - b. 4815.EBA.962.C Biaya Sewa rumah dinas sebesar Rp 81.000.000,00 belum sesuai dengan data dukung yang tertera yaitu sebesar Rp.99.000.000,-

Catatan Penting Lainnya

-

Rekomendasi

Kepala BKK Kelas I Bandung agar segera :

1. Melengkapi dokumen data dukung berupa penawaran harga untuk kegiatan layanan manajemen SDM Internal dan biaya sewa rumah dinas.
2. Melakukan koreksi permasalahan atas kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran yaitu:
 - a. 4249.PEA Koordinasi, digunakan untuk lintas program dan lintas sektor. Kegiatan konsultasi, monitoring dan evaluasi, serta bimbingan teknis ke pusat, ke induk dan wilker menggunakan 4249. QAH. (sesuai Jukren hal.303)
 - b. 4249.PEA.001.051.G.Koordinasi Persiapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji sebesar 164.160.000,- di ganti redaksinya
 - c. 4249. PEA. C, F, G, I, K, M. kegiatan koordinasi berbentuk rapat koordinasi dan rapat evaluasi. Bukan hanya perjalanan dinas, kecuali jika menghadiri undangan dari LS/LP. (sesuai Jukren hal.303)
 - d. 4249 PEF perlu memaksimalkan kegiatan sosialisasi secara daring. (sesuai Jukren hal.304)
 - e. 4249.QAA.012. F sebesar Rp 183.771.000,- dapat menggunakan SBK QAH.U19.
 - f. 4249.RAB.001 Sarana bidang kesehatan sebesar 1.471.043.000,- baiknya di gabung menjadi satu dengan harga distandarkan, begitu juga dengan ATK.
 - g. Belum ada penganggaran Debarkasi haji
 - h. 4815.AEA. sesuaikan dengan jukren

- i. 4815.EBA.957 Layanan Hukum sebesar Rp4.720.000 di ubah menjadi layanan reformasi birokrasi sesuai jukren
- 3. Kesesuaian anggaran pengadaan dengan ketentuan dan data dukung
 - c. 4249.TBC.001 Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp.218.249.000,- Data dukung pelatihan belum semua ada
 - d. 4815.EBA.962.C Biaya Sewa rumah dinas sebesar Rp 81.000.000,00 belum sesuai dengan data dukung yang tertera yaitu sebesar Rp.99.000.000,-

H. Apresiasi

Tim SKI menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Bagian Perencanaan dan Evaluasi selaku penyusun RKA-K/L atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat terlaksananya kegiatan reviu usulan RKA-K/L ini.

Demikian Laporan Hasil penelaahan usulan RKA-K/L TA 2025 ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

I. Dokumentasi Kegiatan



Ketua Tim SKI,

Yani Dwiyluli Setiani, SKM, MKM
NIP. 197107301993032001